

Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

^{1*}Rachma Ayu Wanodya, ²Danang Wibisono, ³Ibravita Dwi Annisa, ⁴Mayza Almanikma, ⁵Surur Fatma Ningtyas, ⁶Mega Tunjung Hapsari
¹⁻⁶ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Alamat: Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Plosokandang, Tulungagung
Korespondensi penulis: ayurahma065@gmail.com

Abstract: This research effort aims to conduct a comprehensive analysis on the fiscal performance of Pasuruan Regency from 2018 to 2023 and to evaluate the efficiency of regional budget management. The results of the decentralization ratio calculation get an average of 20.92% with a sufficient performance. The results of the calculation of the expenditure growth ratio got an average of 3.45% with poor performance. The ratio of operational expenditure to capital expenditure received an average of 65.36% with good performance. The ratio of capital expenditure to total expenditure got an average of 13.16% with good performance. The ratio of direct and indirect spending to total spending has poor performance results. The tax effectiveness ratio got an average of 97.50% with quite effective performance. The results of this study are expected to be an input for the Pasuruan Regency government which aims to improve budget efficiency and strengthen regional financial autonomy.

Keywords: Regional, Financial, Performance, Fiscal, Independence.

Abstrak: Upaya penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif pada kinerja fiskal Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 hingga 2023 dan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Hasil perhitungan rasio desentralisasi mendapat rata-rata 20,92% dengan kinerja Cukup. Hasil perhitungan rasio pertumbuhan belanja mendapat rata-rata 3,45% dengan kinerja kurang baik. Rasio belanja operasional terhadap modal belanja mendapat rata-rata 65,36% dengan kinerja baik. Rasio belanja modal terhadap total belanja mendapat rata-rata 13,16% dengan kinerja baik. Rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja mendapat hasil kinerja kurang baik. Rasio efektivitas pajak mendapat rata-rata 97,50% dengan kinerja cukup efektif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan memperkuat otonomi keuangan daerah

Kata kunci: Kinerja, Keuangan, Daerah, Kemandirian, Fiskal.

1. LATAR BELAKANG

Dalam wewenang mengatur daerahnya sendiri atau dengan istilah otonomi daerah, dimana setiap pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola pembangunan, kreativitas dan kemandirian daerahnya sehingga pemerintah daerah terdorong untuk mengembangkan kesejahteraan daerahnya (Christia & Ispriyarso, 2019). Kemandirian setiap daerah berbeda beda yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat (Ramadhan et al., 2022). Karena dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah lebih mengenal daerahnya sendiri dan dapat lebih mengembangkan daerahnya melalui pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan. Pembangunan intensif berfokus pada suatu wilayah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan daerah tersebut terutama pada sektor perekonomian khususnya wilayah itu

sendiri. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah masih memerlukan bantuan yang diberikan pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahannya (Ristanti & Handoyo, 2017).

Kemandirian daerah terkait dengan kinerja keuangan menjadi ukuran dalam kemampuan daerah dalam memantau, mengambil, dan mengurus pendapatan asli daerah dalam memenuhi dan menunjang pembiayaan pemerintah serta anggaran dalam belanja daerah. Pentingnya pengukuran kinerja pendapatan ini digunakan untuk menilai manajemen pemerintahannya secara efektif dan efisien.

Gambaran mengenai besaran tuntutan pembiayaan dalam segala aktivitas daerah yang sudah dipresentasikan dalam bentuk nilai dan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dengan periode tertentu kedalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) (Rabban, 2020). Anggaran ini digunakan dalam mengukur kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian daerah mulai dari pembangunan, kreativitas memajukan daerah, dan pelayanan bagi suatu masyarakat yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi kemajuan implementasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan publik secara optimal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang jika dilakukan secara efektif dan efisien maka manfaatnya tidak hanya berdampak di daerah tersebut saja.

Dalam kinerja Kabupaten pasuruan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya, melalui pembiayaan dan belanja daerah karena kedua hal tersebut saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat dipisahkan. Artinya pendapatan asli daerah memiliki andil untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah, dengan demikian pembelanjaan daerah menempatkan dananya dengan baik agar dalam belanja daerah dan pembiayaan dapat dijadikan acuan untuk keberhasilan kewenangan daerah. Tingginya kemandirian suatu daerah menjadi tanda bahwa daerah tersebut mampu dalam membiayai semua pengeluaran tanpa melibatkan pemerintah pusat. Serta dengan derajat desentralisasi yang tinggi memiliki kontribusi besar dalam menghasilkan pendapatan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengukuran Rasio Keuangan

Kinerja keuangan juga untuk melihat kemampuan kekuatan pendapatan dalam pembiayaan belanja daerahnya. Dalam mencapai kemampuan tersebut, pemerintah Kabupaten Pasuruan harus melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemda yang ada.

Pentingnya pengelolaan uang yang fleksibel terutama didalam masa krisis seperti Covid-19 membuat pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus mengorbankan stabilitas fiskal daerah. Pendapatan asli daerah dari hasil pelaksanaan dan pajak dari berbagai perolehan menggambarkan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, hasil yang diperoleh pemerintah dari pendapatan lainnya juga dapat menentukan tingkat kemampuan daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian kemampuan daerah dalam mendanai pemerintahannya dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Derajat desentralisasi ini juga merupakan ukuran kewenangan bersamaan dengan tanggung jawab yang diserahkan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Apabila perolehan desentralisasi bertambah banyak maka pendapatan asli daerah yang diperoleh akan semakin banyak, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan mempercepat pembangunan suatu daerah. Dengan perhitungan:

$$DD = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Pengkategorian tingkatan penilaian untuk menentukan kriteria kinerja rasio adalah sebagai berikut:

1. 00,00% - 10,00%, kinerja sangat kurang
2. 10,01% - 20,00%, kinerja kurang
3. 20,01% - 30,00%, kinerja cukup
4. 30,01% - 40,00%, kinerja sedang
5. 40,01% - 50,00%, kinerja baik
6. >50%, kinerja sangat baik (Harahap, 2020)

Analisis Belanja Daerah

Analisis belanja daerah tentunya sangat bermanfaat karena berfungsi menilai apakah pemerintah daerah sudah memanfaatkan APBD dengan ekonomis, efisien dan efektif (Makka, dkk., 2015). Analisis ini dilakukan karena memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pembiayaan anggaran daerah dengan memprioritaskan alokasi dana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan daerah dan APBD adalah bidang yang penting didalam pemerintahan daerah sehingga harus diawasi dengan cermat. APBD mungkin

bisa dipergunakan untuk memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran, serta berguna dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, APBD dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat dibelanjakan dengan tepat untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diminta untuk mampu dalam mengendalikan belanja daerah, mengatur pengeluaran belanja daerah secara efisiensi dan dapat menghemat anggaran. Pertumbuhan belanja harus diimbangi dengan adanya pertumbuhan pendapatan. Apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan seimbang dalam jangka menengah, maka bisa mempengaruhi kesinambungan serta kesehatan dari keuangan daerah (Sholeh, 2015). Rasio ini juga dapat memberikan informasi mengenai alokasi dan pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan belanja. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$PB\ Th\ t = \frac{Belanja\ TH\ t - Belanja\ Th\ (t-1)}{Belanja\ Th\ (t-1)} \times 100\%$$

Adapun penilaian yang dapat dijadikan acuan:

1. Pertumbuhan belanja \leq Pertumbuhan Pendapatan, menunjukkan kinerja belanja yang baik
2. Pertumbuhan belanja \geq Pertumbuhan Pendapatan, menunjukkan kinerja belanja yang kurang baik

Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja (BOTB)

Rasio Belanja Operasional adalah perbandingan antara belanja operasional terhadap total belanja. Rasio BOTB dapat memberikan keterangan tentang proporsi anggaran daerah yang digunakan pada belanja operasi dalam APBD. Belanja operasi termasuk ke dalam jenis belanja yang memiliki manfaat berakhir pada satu periode anggaran. Belanja operasi memiliki sifat jangka pendek serta terus-menerus maupun berulang pada kondisi tertentu (Suhaedi, 2019). Belanja yang termasuk dalam kategori ini yaitu belanja barang, jasa, hibah, pegawai dan operasional lainnya. Rumus berikut ini dapat digunakan untuk menghitung Rasio Belanja Operasional:

$$\text{Rasio BOTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Perbandingan belanja operasi yang dapat berpengaruh terhadap total belanja daerah, yaitu berkisar antara 60% - 90%

Rasio BOTB \leq 90%, dapat diartikan bahwa belanja operasi baik.

Rasio BOTB \geq 90%, dapat diartikan bahwa belanja operasi kurang baik.

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (BMTB)

Belanja modal yaitu suatu pengeluaran yang dilaksanakan guna memperoleh aset tetap berwujud, dimana dapat memberi fungsi melebihi 12 bulan ketika aset telah dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan (Hidayat, dkk., 2022). Belanja modal berbeda dengan belanja operasi, karena belanja modal memberikan manfaat dan memiliki sifat jangka panjang. Rasio ini memberikan gambaran tentang prioritas pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio BMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio BMTB:

Rasio BMTB $>$ 5%, dapat diartikan belanja operasional yang baik.

Rasio BMTB $<$ 5%, dapat diartikan belanja operasional yang kurang baik.

Rasio Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) terhadap Total Belanja

Belanja Langsung yaitu belanja yang telah dianggarkan dalam APBD dan berhubungan secara langsung dengan suatu program serta kegiatan. Belanja Tidak Langsung yaitu belanja yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan suatu program serta kegiatan (Erowati & Astuti, 2023). Belanja langsung berguna untuk mengukur seberapa besar alokasi anggaran belanja karyawan dari APBD. Sedangkan Belanja Tidak Langsung berguna untuk mengukur besaran pengeluaran daerah untuk alokasi pembayaran gaji pegawai negeri. Rasio ini dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu anggaran yang tersedia telah digunakan secara efektif. Rasio ini juga dapat memberikan informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan anggaran ditahun berikutnya. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja T Langsung} = \frac{\text{Total Belanja T Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria rasio yang telah ditetapkan:

Rasio Belanja Langsung > Rasio Belanja Tidak Langsung, menunjukkan kinerja belanja langsung berjalan dengan baik.

Rasio Belanja Langsung \leq Rasio Belanja Tidak Langsung, menunjukkan kinerja belanja langsung kurang baik. (Selvi dan Hapsari, 2023)

Rasio Efektivitas Pajak

Rasio efektivitas pajak dapat dipergunakan untuk mengetahui besaran suatu realisasi pajak daerah terkait dengan tujuan yang ingin diperoleh, serta dapat mendorong kinerja pemerintahan sebagai suatu pengukuran terkait evaluasi dari kinerja keuangan daerah (Mustofa, 2018). Peran pajak juga berdampak besar bagi kelangsungan dan pembangunan. Keefektifan penggunaan pajak dapat dilihat dari sejauh mana penerimaan suatu pajak daerah telah mencapai targetnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang kinerja pemungutan pajak. Adanya analisis ini juga memungkinkannya terjadi analisis potensi dan kelemahan dalam pemungutan pajak, dan nantinya dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Rasio Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan penilaian:

1. >100% maka kinerja sangat efektif
2. 100% maka kinerja efektif
3. 90% - 99% maka kinerja cukup efektif
4. 75% - 89% maka kinerja kurang efektif
5. <75% maka kinerja tidak efektif

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Selvi & Hapsari pada tahun 2023 dengan judul “Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat dan Sesudah Pandemi Covid-19 (Tahun 2017-2022)” menemukan bahwa kinerja pendapatan dan belanja

daerah di Kabupaten Tulungagung memiliki hasil yang cukup. Hal ini diketahui dari hasil rasio yang telah dihitung oleh peneliti berdasarkan data yang tertera dalam Badan Pusat Statistika Kabupaten Tulungagung serta data pada website DPJK Kemenkeu. Jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan yang masih rendah, telah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tulungagung masih bergantung dengan pemerintah pusat. Lalu juga ditemukan bahwa pertumbuhan belanja lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan pendapatannya. Namun pada dana belanja daerah pemerintah mengutamakan dana dapat dialokasikan lebih banyak pada belanja operasional dibanding belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah masih perlu melakukan evaluasi pada kinerjanya, dan dapat menghemat anggaran serta lebih baik dalam mengatur pengeluaran.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Priambodo pada tahun 2015 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012” yang dilaksanakan di daerah atau kota di Jawa Tengah, menemukan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan pemungutan pajak daerah yang selama ini belum dapat diterima atau dipungut dari masyarakat. Pengalokasian anggaran yang digunakan dalam belanja modal ada baiknya lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat.

Dari penelitian sebelumnya, penelitian ini layak untuk dilakukan karena dapat mengetahui dan menjelaskan apakah kinerja daerah Pasuruan lebih baik dibandingkan daerah lain, dan untuk mengetahui adakah faktor yang dapat mempengaruhi. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai referensi untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya agar dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah analisis data deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pendapatan dan pertumbuhan belanja masyarakat serta mengetahui kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Pasuruan. Perolehan data yang digunakan termasuk kedalam jenis penelitian dengan data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut diambil oleh peneliti dari sumber lain, yang berupa diagram, grafik atau tabel sebuah informasi penting (Rosini, 2023). Data yang diterapkan berasal dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan yang

dipublikasikan serta dari website DJPK Kemenkeu yang berisi portal data APBD. Penelitian ini menggunakan data dari laporan realisasi anggaran dengan rentang waktu 2018-2023.

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya menggunakan prosedur dokumentasi yang sumbernya berasal dari laporan tahunan Badan Pusat Statistika Kabupaten Pasuruan. Laporan yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu laporan pendapatan dan laporan belanja di daerah Kabupaten Pasuruan. Sedangkan dari website DPJK Kemenkeu memerlukan data pajak di daerah Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini tidak hanya menyajikan informasi statis, namun juga memberikan gambaran mengenai kondisi fiskal suatu daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Rasio Keuangan

a. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan (Rp)	DD	Kinerja
2018	595.967.644	3.258.476.591	18,28%	Kurang
2019	684.119.688	3.524.027.342	19,41%	Kurang
2020	700.151.910	3.217.081.717	21,76%	Cukup
2021	701.199.342	3.264.856.321	21,47%	Cukup
2022	736.238.743	3.352.368.858	21,96%	Cukup
2023	825.314.982	3.658.922.507	22,55%	Cukup
Rata-rata	707.165.384,83	3.379.288.889,33	20,92%	Cukup

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel telah diperoleh hasil bahwa ditahun 2018-2019 yaitu masa dimana sebelum pandemi merebak tingkat desentralisasi Kabupaten Pasuruan adalah kurang dengan perolehan persentase di bawah 20%. Kemudian pada masa pandemi *Covid-19* justru mengalami kenaikan dengan presentase sebesar 21,76% ditahun 2020 namun mengalami penurunan ditahun 2021 menjadi 21,47%. Walaupun mengalami penurunan ditahun sebelumnya, di ditahun 2022 mengalami kenaikan yang terlihat dengan kinerja disentralisasinya cukup karena memasuki masa new normal. Ditahun 2023 mengalami kenaikan tertinggi yaitu 22,55%. Serta secara rata-rata desentralisasi Kabupaten Pasuruan selama tahun 2018-2023 diperoleh kinerja cukup dengan perolehan presentase 20,92%. Hal ini

menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan cukup mampu dalam kontribusi menghasilkan pendapatan daerah.

Analisis Belanja Daerah

a. Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 2. Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Belanja (%)	Kinerja
2017	3.333.797.837.559,31	-	-	-
2018	3.140.572.335.212,71	10,0%	-5,79 %	Baik
2019	3.244.331.996.857,72	5,67%	3,24%	Baik
2020	3.238.383.232.383,24	3,12%	1,20%	Baik
2021	3.273.759.884.343,00	7,60%	1,09%	Baik
2022	3.450.040.247.082,16	0,37%	5,38%	Kurang Baik
2023	3.991.431.925.884,00	-98,9	15,6%	Kurang Baik
Rata-rata	3.381.759.637.046,02	2,8%	3,45%	Kurang Baik

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018-2023

Dari tabel tersebut, pemeriksaan pertumbuhan belanja di Kabupaten Pasuruan yang mencakup tahun 2018 hingga 2021 dapat ditafsirkan sebagai indikasi pertumbuhan yang kuat dari 2018 hingga 2022-2023, disandingkan dengan penurunan yang diamati pada periode 2022-2023. Fenomena ini mencerminkan variasi kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan prioritas pengeluaran daerah selama jangka waktu 2018-2021 (ditandai dengan pertumbuhan yang positif). Selama interval ini, tingkat pengeluaran daerah diantisipasi menunjukkan peningkatan yang konsisten atau nyata. Berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pengeluaran yang menguntungkan di Kabupaten Pasuruan selama era ini meliputi peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan investasi dalam infrastruktur. Sebaliknya, periode 2022-2023 (ditandai dengan tren menurun) menunjukkan bahwa pengeluaran daerah, yang sebelumnya telah menunjukkan pertumbuhan positif, diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2023. Pengurangan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor penentu, termasuk konsekuensi dari pandemi COVID-19, pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, dan kalibrasi ulang kebijakan dan prioritas pengeluaran.

Tingkat pertumbuhan pengeluaran rata-rata yang rendah disebabkan dengan adanya tingkat pertumbuhan pengeluaran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan. Contohnya adalah dengan tingkat pertumbuhan pengeluaran sebesar 3,45% ditambah dengan tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,8%. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kemampuan untuk menstabilkan pertumbuhan perlu dilakukan dievaluasi dari satu periode ke periode berikutnya. Dinamika pertumbuhan di Kabupaten Pasuruan tidak kondusif untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan belanja daerah dengan pertumbuhan pendapatan.

b. Analisis Belanja Operasional terhadap Total Belanja

Tabel 3. Rasio BOTB Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	BOTB (%)	Kinerja
2018	2.122.361.640	3.376.868.296	62,84%	Baik
2019	2.135.455.529	3.698.739.777	57,73%	Baik
2020	2.070.414.873	3.238.383.232	63,93%	Baik
2021	2.228.563.489	3.273.759.884	68,07%	Baik
2022	2.343.945.791	3.450.040.247	67,93%	Baik
2023	2.674.895.676	3.733.513.061	71,64%	Baik
Rata – rata	2.262.606.166,33	3.461.884.082,83	65,36%	Baik

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018-2023

Dari tabel di atas, rasio belanja operasional terhadap modal belanja Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil yang terendah dengan presentase kurang dari 90% dari sebelum pandemi COVID-19. Namun, selama pandemi terjadi kenaikan dan penurunan, dari 57,73% ditahun 2019 berubah menjadi 63,93% ditahun 2020 dan naik menjadi 68,07% ditahun 2021. Rasio belanja operasional terhadap modal belanja Kabupaten Pasuruan bahkan meningkat sekitar 14% dari 57,73% menjadi 71,64%. Sehingga pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menggunakan dana untuk belanja operasional sudah pada tempatnya walaupun rata-ratanya masih berada di angka 65,36%, namun dari tahun ke tahun sudah mengalami peningkatan. Dengan demikian perlu dipertahankan dalam menjaga kinerja BOTB dan diharapkan ada upaya untuk meningkatkannya.

c. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 4. Rasio BMTB Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Kinerja
2018	506.488.852	3.376.868.296	14,99%	Baik
2019	585.656.323	3.698.739.777	15,83%	Baik
2020	352.127.050	3.238.383.232	10,87%	Baik
2021	376.073.722	3.273.759.884	11,48%	Baik
2022	476.867.550	3.450.040.247	13,82%	Baik
2023	437.513.356	3.733.513.061	11,71%	Baik
Rata-rata	455.787.808,83	3.461.884.082,83	13.16%	Baik

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 4. Sebelum pandemi COVID-19 hingga tahun lalu, rasio belanja modal di Kabupaten Pasuruan berfluktuasi naik dan turun. Pada tahun 2018, rasionya sebesar 14,99% kemudian meningkat menjadi 15,83% pada tahun 2019. Namun, pada awal pandemi COVID-19, rasio tersebut turun drastis dari 15,83% di tahun 2019 menjadi 11,48% di tahun 2021. Pada masa new normal, rasio belanja modal mulai mengalami kenaikan menjadi 13,82% di tahun 2022, tetapi kemudian turun menjadi 11,71% di tahun 2023.

Secara keseluruhan, rasio belanja modal terhadap total belanja di Kabupaten Pasuruan dengan rentang waktu 2018-2023 memiliki kinerja yang baik, meskipun sempat terjadi penurunan di tahun 2023. Hal ini sudah ditunjukkan dengan hasil dari nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja diketahui 13,16% dimana nilai tersebut lebih dari 5% dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Dan dapat disimpulkan bahwa kinerja belanja modal Kabupaten Pasuruan masih berada didalam proses penanaman modal guna pembangunan wilayah.

d. Analisis Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 5. Rasio BL dan BTL Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	BL (%)	BTL (%)	Kinerja
2018	1.515.981.564	1.860.886.733	3.376.868.296	44,89%	55,10%	Kurang Baik
2019	1.688.147.594	2.010.592.183	3.698.739.777	45,64%	54,35%	Kurang Baik
2020	1.264.147.797	1.974.235.436	3.238.383.232	39,03%	60,96%	Kurang Baik
2021	1.307.126.968	1.966.632.916	3.273.759.884	39,92%	60,07%	Kurang Baik
2022	1.493.376.798	1.956.663.449	3.450.040.247	43,28%	56,71%	Kurang Baik
2023	1.656.548.427	2.076.964.635	3.733.513.061	44,36%	55,63%	Kurang Baik
Rata-rata	1.487.554.856,5	1.974.329.225,33	3.461.884.082,83	42,96%	57,03%	Kurang Baik

Sumber: Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel diatas dapat memberikan kesimpulan bahwasanya rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja di daerah Kabupaten Pasuruan memiliki kinerja yang kurang baik pada periode 2018-2023. Hasil yang diperoleh diketahui bahwasanya rasio belanja langsung yang dihasilkan lebih kecil, dimana rata-ratanya berada di angka 42,96% dibandingkan nilai dari rasio belanja tidak langsung dengan rata-rata sebesar 57,03%. Dimana perbedaan yang sangat signifikan terjadi ditahun 2020 dengan perolehan rasio belanja tidak langsung mencapai 60,96% dan rasio belanja langsung berada di 39,03%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja pada Kabupaten Pasuruan lebih dominan dan memiliki peningkatan pada belanja secara tidak langsung dalam kurun waktu 4 tahun ini. Serta diharapkan kedepannya ada upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja belanja langsung di Kabupaten Pasuruan.

e. Analisis Rasio Efektivitas Pajak

Tabel 6. Rasio Efektifitas Pajak Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Tahun	Pajak Daerah		Rasio	Kinerja
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
2018	349.380.000.000	357.260.000.000	102,25%	Sangat Efektif
2019	399.620.000.000	364.180.000.000	91,13%	Cukup Efektif
2020	445.070.000.000	360.890.000.000	81,08%	Kurang Efektif
2021	420.510.000.000	393.590.000.000	93,59%	Cukup Efektif
2022	425.140.000.000	425.520.000.000	100,08%	Sangat Efektif
2023	430.440.000.000	503.300.000.000	116,92%	Sangat Efektif
Rata – rata			97,50%	Cukup Efektif

Sumber: Kementerian Keuangan, Direktorat Perimbangan Keuangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Dari perhitungan di atas telah diketahui nilai dari efektivitas pajak di daerah Kabupaten Pasuruan yaitu sangat efektif pada tahun 2018 dengan tingkat kinerja 102,25%. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 sampai 2021 terjadi penurunan kinerja karena adanya pandemi, sehingga kinerja menurun bahkan pada tahun 2020 penurunannya sangat signifikan diangka 81,08% dengan kinerja kurang efektif. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 efektifitas pajak Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang signifikan di bandingkan dari tahun 2018-2020. Yang artinya secara keseluruhan kinerja efektifitas pajak Kabupaten Pasuruan sudah cukup efektif dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan analisis rasio keuangan Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2018–2023 dapat dikatakan bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja memperlihatkan hasil yang baik. Dari 2018 hingga 2023, rasio desentralisasi masih berada dalam kategori cukup dengan rata-rata 20,92%, yang menungudikasikan bahwa kontribusi PAD masih perlu ditingkatkan. Rasio pertumbuhan belanja menunjukkan hasil yang baik, dimana pertumbuhan belanja diketahui lebih rendah daripada pertumbuhan pendanaan hingga 2021. Dua rasio lainnya yaitu Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dan Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung masih perlu untuk ditingkatkan dalam penggunaannya. Rasio Belanja Modal berkisar antara 8,14% dan 13,92%, dengan rata-rata 10,91% yang masih berada di atas 5%, namun kontribusinya

perlu ditingkatkan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini ni karena rasio belanja langsung pada periode 2018–2023 lebih rendah dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung, yang memiliki rata-rata masing-masing yaitu 42,96% dan 57,03%. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kabupaten Pasuruan periode 2018–2023 harus terus ditingkatkan lagi, terutama dengan meningkatkan PAD, belanja langsung, dan belanja modal serta menyesuaikannya dengan dampak pandemi Covid-19 agar dapat meningkatkan belanja dan untuk mensejahterakan masyarakat Pasuruan di waktu yang akan datang.

Saran yang dapat disampaikan untuk peneliti berikutnya adalah untuk memperbanyak rasio lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini sehingga nantinya dapat berguna untuk memperdalam analisis. Penambahan rasio akan membantu memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kondisi keuangan daerah serta efektivitas dalam pengelolaannya.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2018). Kabupaten Pasuruan Dalam Angka Tahun 2022. Retrieved from <https://pasuruankab.bps.go.id>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Erowati, D., & Astuti, P. (2023). Perencanaan dan penganggaran program responsive gender. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Hidayat, R., Paga'ga, R., & Ningsi. (2022). Rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017–2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2), 208–216. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.208>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Penerimaan pajak Indonesia dan pertumbuhannya tahun 2018–2023. Retrieved from <https://www.kemenkeu.co.id>
- Makka, H. A., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2015). Analisis kinerja belanja daerah dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4), 221–333.
- Mustofa, A. F. (2018). Kontribusi dan efektivitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1634>
- Rabbani, D. R. S. (2020). Public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah: Telaah proses refocusing dan realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. *Jurnal LEGISLATIVE*, 4(1), 59–78.
<https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12321>

Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Syntax Transformasion*, 2(6), 832–846.
<https://doi.org/10.46799/jst.v3i6.572>

Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2(1), 116–122.
<https://doi.org/10.31002/rak.v2i2.220>

Rosini, I. (2023). *Metode penelitian akuntansi kuantitatif dan kualitatif*. Indramayu: CV Adanu Abimata.

Selvi, N. M., & Hapsari, M. T. (2023). Kinerja pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tulungagung sebelum, saat, dan pasca pandemi Covid-19 (Tahun 2017-2022). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, 4(1), 205–214.
<https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8305>

Soleh, A. (2015). Analisis belanja pemerintah daerah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 28–38.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.92>

Suhaedi, W. (2019). Analisis belanja daerah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 18(2), 63–78.
<https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.82>